

SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Kasus Putusan No. 351/Pid.B/2013/PN.WTP)

Oleh

ARFANDI SANUBARI

NIM B111 11 075

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

Halaman Judul

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan
(Studi Kasus Putusan No. 351/Pid.B/2013/PN. Watampone)**

Oleh

Arfandi Sanubari

B111 11 075

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka
penyelsaian Studi Sarjana untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bagian Hukum Pidana

**Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Makassar
2015**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

(Studi Kasus Nomor : 351/PID.B/2013/PN.Watampone)

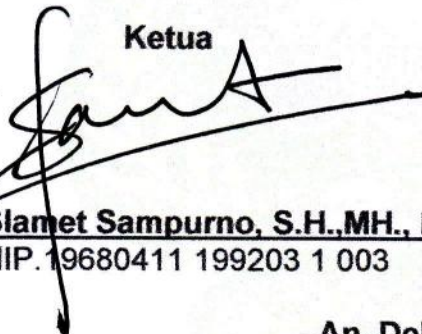
Disusun dan diajukan oleh

**ARFANDI SANUBARI
B111 11 075**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 20 Agustus 2015
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



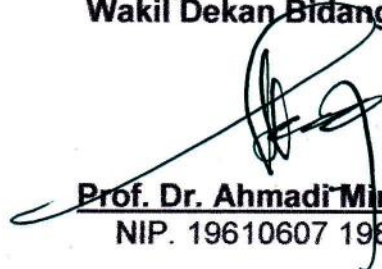
Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,MH., DFM
NIP. 19680411 199203 1 003

Sekretaris



Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H.
NIP.19660827 199203 2 002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Arfandi Sanubari

Nomor Poko : B111 11 075

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana

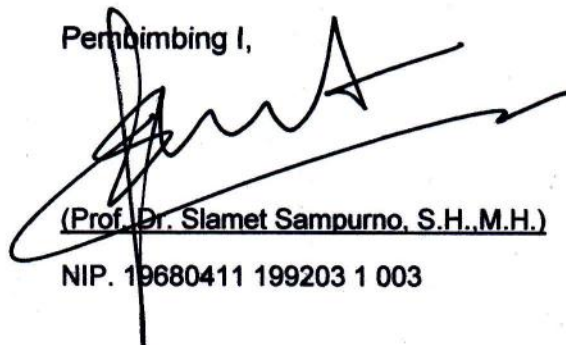
Penggelapan

(Studi Kasus Putusan No. 351/Pid.B/2013/PN.
Watampone)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

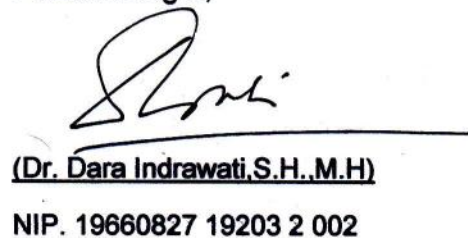
Makassar, 6 juli 2015

Pembimbing I,



(Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.)
NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing II,



(Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H.)
NIP. 19660827 19203 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ARFANDI SANUBARI**
No. Pokok : B111 11 075
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan
(Studi Kasus Putusan
No.351/Pid.B/2013/PN.Watampone)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2015



Prof. Dr. Alhadi Miru, S.H., M.H.

NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

Arfandi Sanubari (B111 11 075) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan” (Studi Kasus Putusan No. 351/Pid.B/2013/PN.Watampone) di bawah bimbingan oleh Prof. Dr. Slamet Sampurno.S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Dr. Dara Indrawati.S.H.,M.H. selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan No.351/Pid.B/2013/PN.Watampone serta memberikan penjelasan mengenai kesesuaian Putusan No.351/Pid.B/2013/PN.Watampone dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian dilaksanakan di Watampone, yaitu Pengadilan Negeri Watampone dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut; (1) dalam Putusan No.351/Pid.B/2013/PN.WTP Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 378 KUHP. Diantara unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yang dianggap terbukti secara sah meyakinkan adalah Pasal 372 KUHP, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. (2) dalam Putusan No.351/Pid.B/2013/PN.Watampone proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang telah dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling mencocoki. Kemudian mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya sadar bahwa perbuatannya adalah tindak pidana, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan salam dan shalawat kepada junjungan dan panutan kita baginda Rasulullah SAW, yang telah memperkenalkan kita kepada Islam agama “*rahmatan lil'alam*”.

Penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Sebuah kelegaan sesaat, karena segala sesuatunya tidak berakhir di sini, melainkan baru saja dimulai. Penulis ingin sekali berterima kasih kepada mereka yang telah membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan hati penulis.

Demi malam-malam panjang yang telah penulis lalui, demi waktu-waktu yang penulis prioritaskan, demi segala energi yang penulis punyai, penulis hanya berpikir bahwa ini memang sudah waktunya bagi penulis untuk melalui proses ini.

Pembuatan skripsi ini jelas mengalami banyak halangan yang seringkali membuat penulis merenung di pojok kamar hingga kepala pusing serta membuat penulis tidak bisa tidur nyenyak bermalam-malam. Sepanjang hari otak dipenuhi dengan buku-buku referensi, hati dipenuhi rasa dag dig dug menanti jawaban pembimbing untuk konsultasi, kondisi

komputer yang sering ada masalah, entah itu *hang*, tinta atau kertas A4 habis.

Keluarga yang penulis selalu cintai dengan menghaturkan rasa hormat yang sebesar-besarnya dan berterima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan Ayahanda A. Arifuddin Nawung dan ibunda tercinta Mintarsimin Harami, orang tua terhebat di dunia yang telah memberikan kasih sayangnya yang begitu tulus dalam doa dan dukungannya selama ini. Begitu pula saudara-saudaraku yang tercinta Armi Eliyanti, S.Pd. Arman Harianto, Sos. Arnita Yuliyanti, S.Pd, yang selalu dan tak pernah putus asa memberi semua dukungan yang dapat diberikan, dari yang bersifat fisik, mental, dan spiritual.

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan, juga petunjuk dari Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi utama yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberikan bimbingan dengan sabar, saran dan kritik yang membangun. Serta kepada Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi kedua yang selalu menyempatkan diri untuk memberikan umpan balik untuk kemajuan skripsi penulis.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, untuk dijadikan sebagai bahan bacaan atau untuk menambah pustaka khususnya Hukum Pidana bagi alumnus yang penulis cintai dan banggakan yang telah membesarkan penulis, dan semoga karya ini dapat menjadi berkah bagi siapapun yang memanfaatkannya.

Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib saya berikan kepada Yth :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Yth. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III.
4. Ketua Pengadilan Negeri Watampone, dan khususnya Andi Fajar Menyingsing, S.H., yang telah memberikan waktu untuk membantu penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H., Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., dan Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., yang telah berperan sebagai penguji skripsi ini ditengah kesibukan beliau dan memberikan umpan balik dan masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan skripsi ini.

6. Prof. Dr. Muh. Guntur Hamzah, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik selama berkuliah di kampus merah ini.
7. Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan kepada Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana. Alhamdulillah dalam pemasukan judul, penulis tidak mengalami kesulitan berkat bantuan beliau.
8. Para Dosen/Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, betapa beliau sangat berjasa dalam menggembleng penulis, terutama dalam pemahaman atas berbagai konsep dalam dalam ilmu hukum.
9. Rekan-rekan seperjuangan dan sependaftaran dalam mengarungi dunia perkuliahan, mail, acha, fajar, akbar, eky, yayan, a. Asho, agam, ito, adi, anis, zainal, achmad, dan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan, dengan segala macam keunikan mereka.
10. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Hukum Bone (IMHB) tanpa terkecuali yang telah memberi arti dari keutuhan dan rasa solidaritas persahabatan yang sebenarnya (Getteng, Lempu, Tettong Ri Ada Tongeng Arung Palakka).
11. Rekan-rekan di "Mediasi" 2011 tanpa terkecuali, penulis bangga menjadi salah satu dari kalian.
12. Almamaterku, Tunjukkan Merahmu !!!

Serta semua pihak yang telah membuat warna-warni dalam pengerjaan skripsi ini pada khususnya dan dalam hidup saya pada umumnya. Karena hidup tak hanya ada hitam dan putih, hidup tak

hanya untuk diri sendiri. Ternyata menjadi idealis sangat tidak mudah dan menekan. Mungkin lebih baik kalau berusaha menjadi realis dengan berbuat sebaik mungkin.

Akhir kata

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu"alaikum Wr. Wb.

Makassar, 6 juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15

B. Penggelapan.....	21
1. Pengertian Penggelapan	21
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	22
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan	26
C. Pidana dan Pemidanaan.....	30
1. Pengertian Pidana	30
2. Jenis-Jenis Pidana	31
D. Putusan Hakim	
1. Pengertian Putusan Hakim	33
2. Jenis-Jenis Putusan	35
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Lokasi Penelitian.....	46
B. Jenis dan Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	47
D. Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Penerapan Pasal 372 KUHP terhadap kasus Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Perkara No. 351/Pid.B/PN.WTP	
1. Posisi kasus.....	48
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	49
3. Tuntutan Penuntut Umum	52

4. Komentari dan Analisis Penulis	56
B. Pertimbangan Hukum Hakim Atas Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Perkara Pidana No. 351/Pid.B/2013/PN.WTP	57
1. Pertimbangan Fakta	58
2. Pertimbangan Yuridis Hakim	59
3. Amar Putusan	65
4. Komentari dan Analisis Penulis	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA.....	71
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu pemahaman yang sering timbul dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembuat aturan di negeri ini membuat serta menerapkan peraturan yang berlaku terhadap tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang disertai dengan ancaman hukuman. Suatu perbuatan yang dibentuk atas dasar kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang lantaran pembentuk undang-undang menganggap perbuatan itu dapat membayakan suatu kepentingan hukum.

Undang-undang telah memberikan perlindungan atas kepentingan-kepentingan hukum. Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga

manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian itu disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Seiring perkembangan zaman sekarang ini, tindak kriminal marak terjadi. Hal ini dikarenakan dari perkembangan zaman yang semakin modern baik dari segi pemikiran maupun teknologi membuat peluang untuk melakukan tindak kriminal semakin besar terjadi dengan menghalalkan berbagai cara yang berakibat pada kerugian yang diderita oleh seseorang korban kejahatan dan atau pelanggaran nantinya. Salah satu kerugian yang dialami oleh seseorang yang telah menjadi korban dari pelaku kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Untuk melindungi korban akan harta kekayaannya, maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian kepada harta kekayaan seseorang yang diatur dalam buku II KUHP. Diantara beberapa tindak pidana dikenal dengan istilah penggelapan.

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu faktor penyebab terpuruknya sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat, penghormatan atas nilai-nilai hukum yang ada mulai bergeser, masyarakat mulai berfikir materialistis dan egois dalam menghadapi kehidupan saat ini, hal ini juga menyebabkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sesama individu.

Kecenderungan usaha untuk mencapai kesejahteraan material dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mulai tampak, sehingga mulai banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan kesempatan secara ilegal untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan hak-hak dari orang lain serta norma-norma yang ada. Hal ini diperburuk dengan semakin luasnya tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan akan membawa sisi negatif yaitu pelanggaran hak-hak sosial serta lunturnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV Pasal 372, 373, 374, 375, 376, dan 377 KUHP. Penggelapan dengan segala macam bentuknya merupakan suatu jenis tindak pidana yang cukup berat bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Hal tersebut berbanding lurus dengan upaya pemberantasannya yang semakin berat untuk dilakukan.

Pemberantasan tindak pidana penggelapan harus dituntut dengan cara yang sesuai dengan yang terdapat di dalam KUHP, serta melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam

pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Polisi, Jaksa, dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum merupakan unsur yang menjalankan tugasnya sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana. Para penegak hukum ini masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Ketiganya secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali narapidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji permasalahan yang timbul dalam sebuah karya ilmiah hukum/skripsi yang berjudul ***"Tinjauan Yurdis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan No. 351/Pid.B/2013/PN. Watampone)"***

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka Penulis menarik beberapa masalah untuk dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 372 KUHP terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam Putusan Perkara No. 351/Pid.B/2013/PN.Watampone ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim atas kasus tindak pidana penggalapan dalam Putusan Perkara pidana No. 351/Pid.B/2013/PN.Watampone ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerepan Pasal 372 terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam Putusan Perkara pidana No. 351/Pid.B/2013/PN. Watampone.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara pidana No. 351/Pid.B/2013/PN. Watampone.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan para kalangan yang berminat dalam kajian bidang yang sama.
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama bagi para aparat penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan di Kabupaten Bone pada khususnya. Bagi masyarakat luar, penulisan ini dapat dijadikan

sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman. Dalam bahasa belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara harfiah *Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Adami Chazawi (2010:67-68) berpendapat bahwa ada tujuh istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit*, diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.

Untuk memberi gambaran tentang pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit*, berikut penulis kemukakan pendapat menurut beberapa para ahli antara lain :

Moeljatno (Adami Chazawi 2010:71) menggunakan istilah perbuatan pidana dalam memberikan pengertian tentang *strafbaarfeit*. Beliau berpendapat bahwa “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Van Hattum berpendapat bahwa pengertian *strafbaarfeit* adalah pengertian yang eliptis, yaitu sebagian kalimat pada istilah itu dihilangkan yang dianggap tidak perlu. Lengkapnya adalah *feit terzaken van hetwelk een persoon strafbaar is* yang berarti tindakan karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.

Menurut Van Hattum (P.A.F. Lamintang 2014:182) mengatakan bahwa “perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaarfeit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu ‘tindakan’, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzaken van hetwelk een persoon strafbaar is*.

Jadi menurut pendapat Van Hattum di atas antara *feit* dan *persoon* yang melakukannya tidak dapat dipisahkan.

Simons (P.A.F. Lamintang 2014:183) telah merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Berbeda dengan pendapat Van Hattum dan Simons. Pompe (P.A.F. Lamintang 2014:180-181) memberi pengertian tentang *strafbaarfeit* ke dalam dua (2) segi, yaitu :

1. Segi teoretis, *strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
2. Segi hukum positif, *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Beliau juga berpendapat bahwa perbedaan antara teori dengan hukum positif sebenarnya hanyalah bersifat semu. Oleh karena itu, yang terpenting bagi teori itu adalah, bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakan-tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah

dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedangkan hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu *schuld* tanpa adanya *wederrechtelijkheid*. Dengan demikian sesualah sudah apabila pendapat menurut teori dan pendapat menurut hukum positif, kita satukan dalam suatu teori yang berbunyi *geen straf zonder schuld* atau tidak ada sesuatu hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan untuk menjatuhkan suatu hukuman (pidana) tidaklah cukup hanya perbuatan pidana, melainkan juga harus ada kemampuan bertanggung jawab, atau seseorang yang dapat dipidana apabila *strafbaarfeit* yang ia lakukan tidak bersifat *wederrechtelijkheid* dan telah dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja.

Simons (Zainal Abidin 2010:224) menggunakan istilah *Strafbaarfeit*, dengan merumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Zainal Abidin (2010:231) berpendapat bahwa istilah deliklah yang paling tepat, karena:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral;
- c. Orang yang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;

d. Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lain) selain berarti perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda seperti perbuatan yang harus disusul oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis antara keduanya.

Berdasarkan berbagai rumusan yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum di atas tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan dan tindakan manusia, dengan tindakan tersebut seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Jika diteliti peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti KUHPidana tidak ditemukan pengertian tentang tindak pidana, melainkan tiap-tiap pasal dalam undang-undang tersebut hanya menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda bahkan ada yang menyebutnya sebagai kualifikasi tindak pidana.

Zainal Abidin (2010:220-221) berpendapat bahwa :

disebutkannya unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pembuat tindak pidana, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikan dalam sidang pengadilan negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expresiss verbis* (tegas) di dalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur tindak pidana. Ada unsur-unsur tindak pidana yang sering tidak disebut di dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur, misalnya unsur melawan hukum yang materil dan tidak adanya dasar pembenar. Unsur yang tidak dengan tegas di dalam undang-undang biasa dinamakan unsur diam-diam, yang tidak perlu dimuat di dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan.

Unsur diam-diam perlu diterima sebagai asumsi , namun demikian terdakwa dan atau penasehat hukumnya dapat membuktikan ketiadaan unsur-unsur itu. Misalnya seorang dukun penyunat di sebuah kampung yang tidak mempunyai Puskesmas yang diadili karena menyunat orang tanpa adanya izin praktek, dituntut karena menganiaya, dapat membuktikan bahwa perbuatanya tidak melawan hukum materil, karena profesinya diakui oleh masyarakat dan oleh karena itu dirasakan tidak tercela.

Zainal Abidin (2010:221) berpendapat bahwa walaupun unsur-unsur tiap-tiap tindak pidana berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

1. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
2. Akibat (khusus tindak pidana yang dirumuskan secara materil);
3. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materil (unsur diam-diam);
dan
4. Tidak adanya dasar pembenar.

Moeljatno (Adami Chazawi 2010:79) menggunakan istilah perbuatan pidana dalam memberikan pengertian tentang *strafbaarfeit*. Beliau berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R. Tresna (Adami Chazawi 2010:80) berpendapat bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak (*strafbaar feit*) adalah

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau mebiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*Statbaar Gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).¹

Pada umumnya setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHPidana) dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan, unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.²

¹ <http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html>

² <http://www.sirkulasiku.blogspot.com/2013/05/unsur-unsur-tindak-pidana.html>

Adam Chazawi (2010:82) dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Setelah selesai mencoba menjabarkan mengenai beberapa pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Selanjutnya, akan menjabarkan mengenai jenis-jenis tindak pidana.

Dalam rangka usaha untuk mencoba menemukan suatu pembagian terhadap jenis-jenis tindak pidana yang dianggap lebih

sesuai dengan kebutuhan akan adanya suatu sistem yang lebih logis bagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didasarkan pada asas-asas tertentu, para guru besar telah membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum ke dalam dua macam *onrecht*, yaitu mereka sebut *crimineel onrecht* dan *policie onrecht*.³

Crimineel onrecht adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan "*recthsorde*" atau "tertib hukum" dalam arti yang lebih luas daripada sekedar "kepentingan-kepentingan", sedangkan yang dimaksud sebagai *policie onrecht* itu adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan "kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat".⁴

Para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita sebelumnya telah membuat suatu pembagian ke dalam apa yang mereka sebut *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*.

Rechtsdelicten adalah delik yang pada kenyataannya mengandung suatu sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai

³ P.A.F. Lamintang-Fransiscus T. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 206.

⁴ *Ibid*, hal 100

tindakan-tindakan yang terlarang dalam undang-undang. Sedangkan *wetsdelicten* adalah tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan hukumnya ketika telah diatur oleh hukum tertulis, dalam hal ini peraturan perundang-undangan.⁵

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa pembagian jenis tindak pidana bukanlah hal baru kita jumpai. Dalam KUHP di Indonesia telah membaginya ke dalam dua (2) bagian, yang pertama sering kita dengar adalah kejahatan (*misdrivejen*) yang terdapat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtridigen*) yang terdapat dalam Buku III.

Selain yang terdapat dalam KUHPidana, dalam ilmu hukum pidana juga dikenal juga dikenal beberapa jenis tindak pidana lainnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Delik Formil (*formeel delict*) dan Delik Materil (*materieel delict*)

Delik formil (*formeel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Sedangkan delik materil (*materieel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁶

⁵ *Ibid*, hlm 209

⁶ *Ibid*, hlm 211

2. Delik Komisi (*delicta commosionis*) dan Delik Omisi (*delicta ommisionis*)

Delik komisi (*delicta commosionis*) adalah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Ini dapat berupa delik yang dirumuskan secara materil maupun formil. Di sini orang melakukan perbuatan aktif dengan melanggar larangan. Delik omisi (*delicta ommisionis*) adalah delik yang dilakukan dengan mengabaikan, maksudnya ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukannya perbuatan itu, maka ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Dalam hal ini ia telah melakukan telah tindak pidana suatu keawajiban hukum.⁷

3. Delik Selesai (*aflopende delicten*) dan Delik Berlanjut (*vortdurende delicten*).

Delik selesai (*aflopende delicten*) adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya pencurian dalam pasal 362 KUHPidana, jika perbuatan mengambil selesai, maka delik itu telah dianggap selesai secara sempurna. Delik berlanjut (*vortdurende delicten*) adalah delik yang terjadi karena meneruskan suatu keadaan yang dilarang, seperti pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, tidak selesai

⁷ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 128.

seketika, bahkan sangat lama dan akan berhenti setelah korban terbebaskan/dibebaskan.⁸

4. *Opzettelijke Delicten* dan *Culpooze Delicten*

Opzettelijke Delicten adalah delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”. *Culpooze Delicten* adalah delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.⁹

5. *Zelfstandige delicten* dan *voortgezetta delicten*

Yang dimaksud dengan *Zelfstandige delicten* adalah delik yang berdiri sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan *voortgezetta delicten* adalah delik-delik yang pada hakekitnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, yang karena sifatnya dianggap sebagai satu delik. Profesor Simons menyangsikan apakah *voortgezetta delicten* seperti itu dikenal dalam Undang-Undang Pidana kita, *voortgezetta delicten* di dalam ilmu hukum pidana juga sering disebut sebagai *delicta continuata*.¹⁰

6. *Klacht Delicten* dan *Gewone Delicten*

Klacht Delicten adalah pada kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan, *Gewone Delicten* adalah delik

⁸ Adami Chazawi, *Ibid*, hlm. 130.

⁹ P.A.F. Lamintang-Fransiscus T. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 213

¹⁰ *Ibid*, hlm. 214

atau tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.¹¹

Mengenai *klachtdelict* (delik aduan) tersebut terdapat 2 bagian, yaitu *absolute klachtdelict* (delik aduan absolut) dan *relative klachtdelict* (delik aduan relatif).

Absolute klachtdelict (delik aduan absolute) adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut, contohnya perzinahan. Sedangkan, *relative klachtdelict* (delik aduan relatif) adalah delik dimana adanya pengaduan itu hanyalah merupakan suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus, contohnya pencurian dalam keluarga. Dalam tindak pidana relatif ini, pengadu harus menyebutkan orang-orang yang dia duga merugikan dirinya.¹²

7. *Delicten Communia dan Delicta propria*

Delicten communia adalah delik-delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan yang dimaksud dengan *delicta propria* adalah delik-delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu, misalnya sifat-sifat sebagai pegawai negeri, sebagai nahkoda ataupun sebagai anggota militer.

Delicten communia itu juga sering disebut *gemene delicten* (delik

¹¹ *Ibid*, hlm. 217.

¹² *Ibid*, hlm. 218.

umum). Sedangkan *delicta propria* juga sering disebut *bijzondere delicten* (delik khusus).¹³

Selain yang telah dikemukakan di atas, masih banyak literatur yang membahas mengenai jenis-jenis tindak pidana.

B. Penggelapan

1. Pengertian Penggelapan

Tindak pidana penggelapan telah diatur dalam Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), pasal 372-377 KUHPidana. Selain diatur dalam Bab XXIV terdapat rumusan penggelapan, yaitu pasal 415 dan 417 yang merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang sudah dimasukkan ke dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, oleh karenanya dimuat dalam bab tentang kejahatan dalam jabatan (Bab XXVIII).

Pengertian yuridis mengenai penggelapan telah dimuat dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yaitu sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”

¹³ *Ibid*, hlm. 223.

Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dengan pasal 362 KUHPidana. Hanya bedanya, kalau dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada ditangan sipelaku, sedangkan dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangan sipelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.¹⁴

Contoh A meminjam mobil kepada B, setelah mobil dikuasai oleh A tanpa seizin dari B, mobil tersebut dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi oleh A. Mendekati pengertian bahwa tindak pidana tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang mobil tersebut.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan berdasarkan Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372-377 terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

- a. Penggelapan biasa;
- b. Penggelapan ringan;
- c. Penggelapan dengan pemberatan;
- d. Penggelapan dalam keluarga.

¹⁴ Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Rawamangun, hlm. 140.

a. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa atau sering juga dikenal dengan tindak pidana dalam bentuk pokok. Penggelapan yang ketentuannya telah diatur dalam pasal 372 KUHPidana yang menegaskan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Tindak pidana penggelapan (*verduistering*). Adapun unsur-unsur dalam pasal 372 ada dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur objektif

- a) Perbuatan memiliki;
- b) Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- c) Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan.

2. Unsur subjektif

- a) Kesengajaan; dan
- b) Melawan hukum.

Maksud memiliki merupakan setiap perbuatan menguasai barang atau suatu kehendak untuk menguasai barang atas kekuasaannya yang telah nyata dan merupakan tindakan sebagai

pemilik barang. Dengan sengaja (*opzet*) maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah menyadari dan mengetahui ketika menguasai barang yang ada padanya, dengan tidak mau mengembalikan dan perbuatan yang dilakukan disadari telah melawan hukum, serta penguasaan terhadap barang itu hanya untuk kepentingan pribadinya.¹⁵

b. Penggelapan Ringan (*geepriivilgeerd verduistering*)

Penggelapan ringan merupakan penggelapan yang telah diatur dalam pasal 373 KUHPidana. Dalam ketentuan pasal tersebut merumuskan sebagai berikut:

“perbuatan yang telah dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”

Berdasarkan rumusan di atas, yang menjadikan pasal 373 KUHPidana menggolongkan sebagai penggelapan ringan adalah dipertimbangkannya unsur bukan ternak dan harga tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

c. Penggelapan dengan pemberatan (*geequalicifeerde verduistering*)

penggelapan dengan pemberatan diatur dalam pasal 374 sebagaimana tindak pidana lainnya, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan adalah tindak pidana yang dalam bentuk

¹⁵ *Ibid*, hlm. 140.

pokoknya terdapat unsur-unsur yang memberatkan dalam ancaman pidananya. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan berkualifikasi.

Penggelapan dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 374 KUHPidana, rumusannya sebagai berikut:

“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur adanya “hubungan kerja” dan “karena jabatannya”, yang dimaksudkan dalam hubungan kerja tidak hanya dalam institusi pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga terjadi antara perseorangan.¹⁶

d. Penggelapan dalam lingkungan keluarga

Penggelapan dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 375 KUHPidana, rumusannya sebagai berikut:

“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selalu demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Selain pasal 375, terdapat juga dalam pasal 376 termasuk dalam tindak pidana penggelapan dalam keluarga, yang secara tegas dinyatakan “ketentuan-ketentuan dalam pasal 367 berlaku

¹⁶ *Ibid*, hlm.141.

bagi kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam bab ini”. Pada intinya bahwa ketentuan dalam tindak pidana pada pasal 367 KUHPidana (pencurian dalam keluarga) diberlakukan ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.¹⁷

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif meliputi perbuatan memiliki sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*) dengan penggelapan melawan hukum (*wederechtelijk*).¹⁸

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku yang termasuk di dalamnya, yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok ini mempunyai unsur sebagai berikut:

a. Unsur objektif

¹⁷ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm. 258-260.

¹⁸ <http://garintirana.blogspot.com/2014/01/tindak-pidana-penggelapan.html>

1) Memiliki

Maksud memiliki merupakan setiap perbuatan menguasai barang atau suatu kehendak untuk menguasai barang atas kekuasaannya yang telah nyata dan merupakan tindakan sebagai pemilik barang, yang tidak memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk meminta kembali, bahkan menolak untuk mengembalikan atau menyembunyikan atau mengingkari barang yang diterima dan dikuasainya sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki.¹⁹

2) Sesuatu barang

Unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana telah diterangkan di atas, tidak mungkin dilakukan pada barang-barang yang sifatnya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan pada sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud.

3) Seluruh atau sebagiannya milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada sebagai pemilik sebagaimana telah dijelaskan di atas, barang atau benda yang tidak bertuan tidak dapat menjadi objek penggelapan.

¹⁹ ¹⁹ Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi, *op.cit*, hlm. 140.

Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri milik orang lain yang dimiliki secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun barang itu sebagian dimiliki oleh orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang dibahas di sini adalah maksud dari menguasai, dalam tindak pidana pencurian, menguasai sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan termasuk dalam unsur objektif. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai adalah tujuan utama dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana penggelapan unsur perbuatan menguasai bukan karena kejahatan merupakan ciri pembeda dengan pidana pencurian.

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah mesti harus terkena pidana. Karena, penguasaan terhadap suatu barang bisa saja atas penjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, jual-beli, dan lain sebagainya.

b. Unsur subjektif

1) Unsur kesengajaan

Unsur ini merupakan unsur kesalahan (*schuld*) dalam tindak pidana penggelapan, kesalahan (*schuld*) terdiri dari dua bagian, yaitu kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan

kelalaian (*culpos*). Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. (Moeljatno, 1983:171) memberikan pemahaman mengenai kesengajaan yaitu secara singkat kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui, setidaknya kesengajaan itu ada dua, yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui).²⁰

Dengan sengaja bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah menyadari dan mengetahui ketika menguasai barang yang ada padanya, dengan tidak mau mengembalikan dan perbuatan yang dilakukan disadari telah melawan hukum atau melawan kehendak dari pemilik barang. Barang yang dikuasai semata-mata ditujukan terhadap barang, yang dikuasai itu bukan karena kejahatan, melainkan barang dalam penguasaannya. Penguasaan atas barang itu untuk kepentingan pribadinya.²¹

2) Unsur melawan hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau telarang dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formeel wederechttelijk*). Karena bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut dengan bertentangan

²⁰ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.

²¹ Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi, *loc.it*, hlm. 140.

dengan asas-asas hukum masyarakat, sifat tercela tersebut tidak tertulis.

Dari sudut undang-undang suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (*wederechttelijk*) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.²²

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Untuk memberikan pengertian mengenai pidana berikut para ahli merumuskan tentang arti pidana, yaitu:

Adami Chazawi (2010:24) mengartikan

“Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*stradbbaar feit*)”.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.²³

2. Jenis-jenis Pidana

²² Adami Chazawi, *loc.it*, hlm. 86.

²³ Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 24.

Jenis-jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHPidana. Pidana ini juga berlaku juga bagi delik yaang tercantum di Luar KUHPidana, kecuali jika ketentuan undang-undang itu menyimpang (pasal 103 KUHPidana). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.²⁴

Dalam pasal 10 KUHPidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946)

b. Pidana tambahan:

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Teori pemidanaan dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

²⁴ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, jakarta, hlm 186

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhannya berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. Penjatuhannya pidana yang pada dasarnya penderitaannya pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaannya bagi orang lain.²⁵

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhannya pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afscberikking*);

²⁵ Adami Chazawi, *loc.it*, hlm 157

- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*);
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- 1) Pencegahan umum (*general preventie*), dan
 - 2) Pencegahan khusus (*speciale preventie*).
3. Teori gabungan (*vernengings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.²⁶

D. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

²⁶ Adami Chazawi, hlm. 166.

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada tiga macam, yaitu putusan, penetapan dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum dari hasil pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan adalah pernyataan oleh hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dari hasil pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berasal dari musyawarah antara pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.²⁷

Perihal putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan putusan hakim berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan pidana modern seperti pada Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) sebagai kaidah hukum tidak diperkenankan main hakim sendiri.

Pasal 1 ayat (11) KUHP disebutkan bahwa disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa

²⁷ <https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/>

perdamaian atau bebas lepas dari segala tuntutan dalam hukum serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁸

2. Jenis-Jenis Putusan

Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan hakim atau pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

a. Putusan yang bukan putusan akhir

Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa penetapan dan putusan sela. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148 dan pasal 156 ayat 1 KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara apabila terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat terdakwa jaksa penuntut umum. Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa :

- ❖ Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan pengadilan negeri yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP.
- ❖ Putusan menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP.

²⁸ <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/11202>

- ❖ Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima sebagai mana ketentuan pasal 156 ayat (3) KUHAP disebabkan materi hukum perkara tersebut telah daluarsa, materi perkara dan materi hukum perdata dan sebagainya.

b. Putusan akhir

Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah “*eind vonis*” dan merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan ini terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir berupa:

1) Putusan bebas (*Vrijspreek*)

Putusan bebas (*vrijspreek*) yang telah diatur dalam KUHAP Pasal 191 ayat (1) yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan*” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

2) Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum

(Onslag van alle Rechtsvervolging)

Putusan ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Bila dijabarkan lebih lanjut secara teori pada ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap penjelasan dari segala tuntutan terjadi jika:

- a. Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.
- b. Karena adanya alasan pemaaf dan pembeda.
- c. Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu.

3) Putusan pemidanaan (*Veroordeling*)

Pada dasarnya putusan pemidanaan telah diatur dalam ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Apabila dijabarkan lebih mendalam putusan pemidanaan dapat terjadi jika dari hasil pemeriksaan di persidangan majelis hakim berpendapat.

- Perbuatan terdakwa sebagai mana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana atau penggelapan.
- Dipenuhi ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta dipersidangan. (Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP)²⁹

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

a. Pertimbangan yuridis

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan bebas (*vrijpraak*), hakim harus benar-benar menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Lilik Mulyadi mengatakan bahwa:

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim adalah pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan dengan amar atau diktum putusan hakim”. (<http://www.academia.edu>)

²⁹ <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/11202>

Pertimbangan hakim atau *Ratio Recidendi* adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pada praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pembuktian yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusif komulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua (2) kategori:

“pertimbangan *yuridis* adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan *nonyuridis* dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa”. (<http://www.academia.edu>).

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*) dan *modus operandi* bagaimana tindak pidana dilakukan. Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana

yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah itu majelis hakim mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani secara limitatif dan ditetapkan pendiriannya.

Menurut Lilik Mulyadi setelah diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain:

(<http://www.academia.edu>)

1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasehat hukum.
2. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasehat hukum.
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasehat hukum.

Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan dan memperberat terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa telah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa

belu pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.³⁰

b. Pertimbangan sosiologis

Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya :

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat ini, maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan hukum di negara ini dapat terpenuhi. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berkaitan dengan masalah ini adalah :

“Hakim sebagai penegak hukum menurut pasal 5 (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 bahwa hakim wajib menggali, dan mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Dalam penjelasan menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan

³⁰http://www.academia.edu/7498375/SKRIPSI_TINJAUAN_YURIDIS_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_PENIPUAN?login=&email_was_taken=true&login=&email_was_taken=true

rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai yang hidup di kalangan rakyat sehingga dia harus turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, meresapi, dan mampu memahami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim secara sosiologis dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara adalah:

- 1) Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta hal-hal yang memringankan dan memperberat terdakwa.
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh besar bagi para pelaku, masyarakat, dan hukum itu sendiri.

Semakin besar dan banyak pertimbangan hakim, maka akan semakin mendekati pada putusan yang rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. Untuk mencapai usaha ini maka hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sifat tindak pidana (apakah suatu tindak pidana itu berat atau ringan).
- 2) Ancaman hukuman terhadap tindak pidana itu.
- 3) Keadaan dan suasana pada saat melakukan tindak pidana tersebut (yang meringankan atau memberatkan)
- 4) Pribadi terdakwa yang menunjukkan apakah dia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah dia seorang yang masih muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- 5) Sebab-sebab melakukan tindak pidana.
- 6) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan terdakwa (apakah dia menyesal atas kesalahannya atau dengan keras menyangkal, meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya).
- 7) Kepentingan umum.

c. Pertimbangan subjektif

Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang), dilihat dari unsur-unsur pidana

ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan hukum. Artinya, perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelaku benar-benar telah berbuat seperti apa yang telah terjadi dan pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.
- 3) Harus terjadi adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang dipersalahkan oleh ketentuan hukum.
- 4) Harus melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata dan bertentangan dengan hukum.
- 5) Harus ada ancaman hukuman, artinya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam

suatu perbuatan tertentu dan ketentuan itu memuat sanksi dan ancaman hukumannya.³¹

³¹http://www.academia.edu/7498375/SKRIPSI_TINJAUAN_YURIDIS_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_PENIPUAN.html

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Bone yaitu di Pengadilan Negeri Watampone.

Pemilihan lokasi penelitian tersebut atas pertimbangan, bahwa pada instansi tersebut, sesuai studi kasus yang penulis akan kaji sekaligus yang berwenang memutus perkara tersebut pada peradilan tingkat pertama. Selain itu, penentuan lokasi penelitian tersebut juga atas pertimbangan domisili penulis dan juga keluarga, yang insya Allah dapat membantu kelancaran pembuatan karya tulis ini.

B. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang menangani kasus tersebut.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, hasil kajian ataupun melalui media elektronik yang ada sekarang ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu data juga diperoleh dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara, yang pertama melakukan *observasi*, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung objek penelitian. Kedua dengan cara wawancara (*interview*) langsung kepada hakim Pengadilan Negeri Watampone yang menangani kasus tersebut.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 372 KUHP terhadap kasus Tindak Pidana

Penggelapan dalam Putusan Perkara No. 351/Pid.B/PN.WTP

1. Posisi Kasus

HENDRA RAHMAN sebagai terdakwa yang merupakan karyawan swasta bekerja di lembaga pembiayaan BFI yang bertempat di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 17 Watampone Kabupaten Bone. Pada mulanya terdakwa menerima 1 (satu) buku BPKP asli No. 816957 mobil Daihatzu mobil jenis bus warna hijau muda metalik No. Mesin : DEO7187, No. Rangka/NIL : MHKV1812J9KO35119 dengan nama pemilik IRWAN bin CABBANG yang kemudian dijaminkan kepadanya untuk meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terdakwa HENDRA RAHMAN memasukkan BPKB tersebut ke lembaga pembiayaan BFI untuk diproses, akan tetapi yang diajukan tidak dapat cair karena STNK mobil telah mati. Tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban IRWAN bin CABBANG, BPKB mobil tersebut kemudian dijaminkan kepada EDI untuk meminjam uang sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), terdakwa HENDRA RAHMAN tidak menyerahkan uang tersebut kepada korban tetapi digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, yaitu membayar utang terdakwa.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Kesatu

Bahwa terdakwa HENDRA RAHMAN bin ABD. RAHMAN pada kurun waktu tertentu pada bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2012, bertempat di Jl. Jendral Ahmad Yani No.17 Watampone Kabupaten Bone atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu IRWAN bin CABBANG dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika saksi korban IRWAN bin CABBANG akan meminjam uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa HENDRA RAHMAN yang bekerja di lembaga pembiayaan BFI dengan jaminan BPKB mobil Daihatsu warna hijau muda metalik milik saksi korban. Setelah itu terdakwa HENDRA RAHMAN memasukkan BPKB tersebut ke lembaga pembiayaan BFI untuk diproses, tetapi yang diajukan tidak dapat cair karena STNK mobil tersebut telah mati.

- Bahwa kemudian BPKB mobil tersebut oleh terdakwa HENDRA RAHMAN dijaminkan kepada EDI untuk meminjam uang sebesar Rp106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban IRWAN bin CABBANG. Setelah H. EDI menyerahkan uang sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), terdakwa HENDRA RAHMAN tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban IRWAN bin CABBANG tetapi digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri yaitu untuk membayar utang terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, sehingga saksi korban IRWAN bin CABBANG mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa HENDRA RAHMAN bin ABD. RAHMAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Dakwan Kedua

Bahwa terdakwa HENDRA RAHMAN bin ABD. RAHMAN dalam kurun waktu tertentu pada bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober 2012, bertempat di Jl. Ahmad Yani No. 17 Watampone Kabupaten Bone atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika saksi korban IRWAN bin CABBANG akan meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa HENDRA RAHMAN yang bekerja di Lembaga Pembiayaan BFI dengan jaminan BPKB mobil Daihatzu warna hijau muda metalik milik korban. Setelah itu terdakwa HENDRA RAHMAN memasukkan BPKB tersebut ke Lembaga Pembiayaan BFI untuk diproses, tetapi ternyata yang diajukan tidak dapat cair karena STNK mobil tersebut telah mati.
- Bahwa kemudian BPKB mobil tersebut oleh terdakwa HENDRA RAHMAN dijaminkan kepada EDI untuk meminjam uang sebesar Rp106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban IRWAN bin CABBANG. Setelah H. EDI menyerahkan uang sebesar Rp106.000.000,- (seratus

enam juta rupiah), terdakwa HENDRA RAHMAN tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban IRWAN bin CABBANG tetapi digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri yaitu untuk membayar utang terdakwa, sehingga saksi korban IRWAN bin CABBANG mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Perbuatan terdakwa HENDRA RAHMAN bin ABD. RAHMAN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

3. Tuntutan Penuntut Umum

a. Mencocoki Rumusan Delik

Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan pembuktian mengenai unsur-unsur yang didakwakan yaitu:

Pasal 372 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hak;
3. Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan salah telah melakukan penggelapan.

Ad.1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu terdakwa HENDRA

RAHMAN bin ADB. RAHMAN yang diajukan dalam persidangan didakwa telah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, terdakwa selaku subjek hukum.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni keterangan IRWAN bin CABBANG, A. NURJANNAH binti A. JUNAID, H. EDY bin KASSE, HENDRA H. UMAR bin H. UMAR, dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung adanya petunjuk bahwa pada bulan Mei 2012 bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, terdakwa HENDRA RAHMAN bin ABD. RAHMAN yang bekerja sebagai karyawan swasta di Lembaga Pembiayaan BIFP Finance Watampone Kabupaten Bone menerima BPKB mobil Daihatsu Xenia dari korban untuk meminjam uang kepada BIFP Finance sebanyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta), tetapi uang tidak dapat cair karena STNK mobil telah mati. Kemudian terdakwa tidak mengembalikan BPKB tersebut kepada korban melainkan terdakwa menjaminkan BPKB kepada H. EDY bin KASSE dan mengambil uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa

sepengetahuan korban, dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk membayar utang.

Dengan demikian unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum telah terbukti secara sah.

Ad.3. Unsur sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan salah telah melakukan penggelapan.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni keterangan IRWAN bin CABBANG, A. NURJANNAH binti A. JUNAID, H. EDY bin KASSE. H. UMAR bin H. UMAR, dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya petunjuk bahwa pada bulan Mei 2012 terdakwa diserahkan 1 (satu) BPKB mobil Daihatsu Xenia oleh korban untuk dijaminkan ke Lembaga Pembiayaan BIFP Finance dan meminjan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan tetapi uang tidak dapat cair karena STNK mobil telah mati. Terdakwa tidak mengembalikan BPKB tersebut kepada terdakwa melainkan dijaminkan kepada EDYbin KASSE dan mengambil uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan korban.

Dengan demikian unsur sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan salah telah melakukan penggelapan telah terbukti secara sah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah mencocoki rumusan delik yang terdapat pada pasal 372 KUHPidana, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.

b. Isi Tuntutan Jaksa

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA RAHMAN bin ABD. RAHMAN telah terbukti secara sah dan menyatakan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA RAHMAN bin ABD. RAHMAN dengan pidana penjara 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (buku) BPKB asli No. Rangka/NIK : MHKV1812J9KO35119, Nama pemilik IRWAN, dikembalikan kepada kel. IRWAN bin CABBANG

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah)

4. Komentar dan Analisis Penulis

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternative dengan dakwaan kesatu dengan pasal 372 mengenai penggelapan dan kedua dengan pasal 378 mengenai penipuan. Menurut penulis jaksa lebih memilih dakwaan alternative dibandingkan dengan dakwaan primer dengan pasal 372 KUHPidana dikarenakan jaksa berpikir apabila yang didakwakan hanya pasal 372 saja dimana yang menjadi pokok pasal adalah “barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan” kemudian dipengadilan nantinya tidak terbukti maka terdakwa bisa saja lepas dari tuntutan oleh karena bukti yang didapat oleh jaksa belum cukup untuk memastikan terdakwa hanya perlu didakwakan pasal 372 KUHPidana saja, maka untuk menghindarkan terdakwa lepas dari tuntutan maka jaksa lebih memilih dakwaan alternative.

Menurut penulis keputusan jaksa lebih memilih untuk menggunakan dakwaan alternative sudah tepat. Dakwaan jaksa penuntut umum menjadi sangat penting bagi hakim karena dakwaan itulah yang menjadi dasar hukum hakim dalam

menjatuhkan putusan untuk terdakwa, artinya hakim hanya memeriksa sesuai pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, hakim tidak memiliki kewenangan memeriksa dan memutus diluar dari yang didakwakan jaksa penuntut umum. Bila kemudian dakwaan itu tidak terbukti unsur-unsurnya maka hakim dapat memutuskan terdakwa bebas dari segala tuntutan oleh karena itu jaksa penuntut umum harus cermat dalam menerapkan ketentuan pidana untuk terdakwa dalam dakwaannya agar terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Atas Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Perkara Pidana No. 351/Pid.B/2013/PN.WTP

Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbang yuridis” dibuktikan dan pertimbangan maka hakim terlebih dulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” yang timbul dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya “fakta-fakta persidangan” berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti* dan modus operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimana akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.

A. Pertimbangan Fakta

Bahwa dari uraian fakta persidangan, maka analisis fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

- Bahwa para saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangan di pengadilan dan di bawah sumpah.
- Bahwa keterangan para saksi dalam perkara ini bersesuaian dengan keterangan terdakwa.
- Bahwa para saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun suami istri dengan terdakwa.

b. Keterangan terdakwa

- Bahwa keterangan terdakwa di sidang pengadilan, merupakan keterangan yang bersifat pengakuan, yaitu mengakui dan membenarkan perbuatan yang dilakukannya.

c. Barang bukti

- Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan (2). KUHAP.
- Bahwa barang bukti telah diajukan di dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa bahwa barang bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a,b, dan d KUHAP.
- Bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai petunjuk benar telah terjadi tindak pidana penggelapan dan terdakwa sebagai pelakunya.

d. Petunjuk

- Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta adanya kesesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti. Barang bukti dan keterangan-keterangan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk oleh majelis hakim.

B. Pertimbangan yuridis hakim

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yaitu IRWAN bin CABBANG, A. NURJANNAH binti A. JUNAID, H. EDY bin KASSE, HENDRA H. UMAR bin H. UMAR.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB asli No. 816957 mobil Daihatzu jenis bus warna hijau muda metalik No. Mesin DEO7187, No. Rangka/NIK : MHKV1812J9KO35119, Nama pemilik IRWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan saling berkesesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui kejadiannya pada bulan Mei 2012 bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone.

- Bahwa benar korban menyerahkan 1 (satu) BPKB mobil Merek Daihatsu Xenia No. Pol. DD 1401 OL kepada terdakwa untuk meminjam uang kepada BIFP Finance sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB selanjutnya terdakwa BPKB mobil tersebut, tetapi STNK mobil mati. Maka pihak BIFP Finance tidak menerima BPKB tersebut sebagai jaminan.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengembalikan BPKB tersebut kepada korban. Melainkan terdakwa menjaminkan BPKB kepada H. EDY bin KASSE dan mengambil uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan korban.
- Bahwa benar uang yang diambil dari kel. H. EDY bin KASSE digunakan untuk membayar utang tersebar dimana-mana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada diri tersangka.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 372 KUHPidana dan Pasal 378 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu yaitu Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa,

2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum,
3. Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan salah telah melakukan penggelapan.

Ad.1. Unsur arang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merupakan kata ganti orang, dimana orang itu merupakan subjek hukum. Sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama HENDRA RAHMAN bin ABD. RAHMAN selaku terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung,. Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya menurut hukum. Karena terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap

pertanyaan Majelis Hakim. Oleh karena itu, unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terbukti terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan fakta-fakta hukum setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa berawal pada bulan Mei 2012 bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Macanang, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone dimana saksi korban memberikan BPKB mobilnya kepada terdakwa korban IRWAN bin CABBANG dengan maksud korban ingin menjaminkan kepada kantor BIFP tempat terdakwa bekerja sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk meminjamkan uang di tempat terdakwa bekerja sebanyak Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun tanpa sepengetahuan korban, terdakwa mengambil uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada H. Edy bin Kasse dengan jamina BPKB mobil korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan salah telah melakukan penggelapan

Menimbang, bahwa dalam persidangan fakta-fakta hukum setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa berawal pada bulan Mei 2012 bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Macanang, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone dimana saksi korban memberikan BPKB mobilnya kepada terdakwa korban IRWAN bin CABBANG dengan maksud korban ingin menjaminkan kepada kantor BIFP tempat terdakwa bekerja sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk meminjamkan uang di tempat terdakwa bekerja sebanyak Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun tanpa sepengetahuan korban, terdakwa mengambil uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada H. Edy bin Kasse dengan jamina BPKB mobil korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur “sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan

salah telah melakukan penggelapan” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Maka dakwaan kedua Penuntut Umum tidak perlu lagi dibuktikan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya sebagaimana Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, dan terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa. Oleh karena itu harus dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa. Maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hal yang memberatkan:

- Pengulangan tindak pidana
- Korban kehilangan harta benda

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya,
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Sesuai Pasal 222 KUHP.

C. Amar Putusan

Mengingat Pasal 372 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA RAHMAN bin ABD. RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penggelapan***",
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan,
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan,
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buku BPKB asli No. 816957 mobil Daihatzu, mobil jenis bus warna hijau muda metalik No. Mesin : DEO7187, No. Rangka/NIK : MHKV1812J9KO35119, Nama pemilik IRWAN, dikembalikan pada keluarga IRWAN bin CABBANG,
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

D. Komentar dan Analisis Penulis

Aspek "pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan" merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan.

Selanjutnya, setelah “fakta-fakta dalam persidangan” tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipeertimbangkan terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Menurut praktik lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat kolerasi fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur kesalahan terdakwa.

Pada hakikatnya dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim haruslah menguasai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrina, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.

Dalam Putusan No. 351/Pid.B/2013/PN.Watampone hakim memutus terdakwa HENDRA RAHMAN bin ABD. RAHMAN dengan pidan penjara 1 (satu) tahun, 8 (bulan). Lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu 2 (dua) tahun penjara. Menurut pendapat penulis hukuman yang diberikan oleh hakim masih ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum yang termuat dalam Pasal 372 KUHPidan yaitu 4 tahun penjara. Pidana ini yang ringan ini ditakutkan tidak memberi efek jera terhadap terdakwa, namun hal itu sudah menjadi keputusan dan rasa keadilan dari hakim.

Menurut hemat penulis, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua

alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti penulis adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian. Pasal 372 KUHPidana yang dituntut oleh jaksa berdasarkan fakta-fakta di persidangan unsur-unsurnya telah terpenuhi. Kemudian hakim mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Pelaku dalam perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal di atas, hakim juga melihat tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis Hakim hanya melihat adanya hal-hal yang memeratkan dan meringankan terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis, syarat pembedaan dalam kasus yang diteliti penulis didasarkan pada :

1. Perbuatan terdakwa
 - Mencocoki rumusan delik
 - Melawan hukum,
 - Tidak ada alasan pembenar.
2. Terdakwa

- Mampu bertanggung jawab,
- Terdapat unsur kesalahan,
- Tidak ada alasan pemaaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum materil pada Putusan No. 351/Pid.B/2013/PN.Watampone. menurut penulis sudah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 372 KUHPidana, dan dakwaan kedua Pasal 378 KUHPidana, diantara unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 372 KUHPidana.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan No. 351/Pid.B/2013/PN.Watampone. Menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang berkesesuaian. Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap

untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum haruslah teliti dalam menerapkan ketentuan pidana dan tepat dalam menyusun surat dakwaan. Mengingat bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan pidana. Selain itu jaksa juga harus mempunyai pengetahuan hukum yang baik, bukan hanya hukum secara formil melainkan juga hukum secara materil agar tidak ada kesalahan dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap terdakwa.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka dalam melihat fakta-fakta yang timbul pada persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaa dan Batas Berlakunya Hukum pidana)*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Farid, Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika : Jakarta
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta : Jakarta.
- 2011. *Delik-Delik Tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Ilyas, Amir, dkk. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta : Yogyakarta.
- Ismu, Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group : Jakarta
- Lamintang, dan Fransiscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta Timur.
- Marwan, dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher : Surabaya.
- Ngani, Nico. 2012. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Pustaka Yustisia : Yogyakarta
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Kencana Prenamedia Group : Jakarta.
- Tim Penyusun Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2010. *Pedoman Penulisan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi*. Yamina Jaya : Makasar.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sumber Lain:

www.repository.unhas.ac.id

www.wordpress.com

www.sirkulasiku.blogspot.com

www.tenagasosial.com

www.garintirana.blogspot.com